



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2017



**SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAKARTA, JANUARI 2018**

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian sebagai bahan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas Sekretariat Inspektorat Jenderal selama tahun 2017.

Diharapkan laporan ini dapat dijadikan bahan masukan dalam meningkatkan kualitas dukungan manajemen untuk efektifitas dan efisiensi Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian di masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini kami selaku pimpinan Sekretariat Inspektorat Jenderal, mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pejabat dan pelaksana yang bekerja maksimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2017 sehingga sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian, dalam melaksanakan tugas Sekretariat Inspektorat Jenderal sehingga sasaran pengawasan pengembangan sektor industri dapat tercapai sesuai rencana.

Jakarta, Januari 2018

Sekretaris Inspektorat Jenderal

Liliek Widodo

IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme merupakan tanggung jawab semua instansi pemerintah dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dengan tingkat kinerja yang selalu meningkat. Bentuk perwujudan pertanggungjawaban penyelenggaraan tersebut harus tepat, jelas dan nyata secara periodik.

Salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal pada tahun 2017 adalah melalui Laporan Kinerja Kementerian Perindustrian tahun 2017. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pimpinan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja didalamnya, diminta untuk membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada pimpinan yang lebih tinggi.

Secara umum gambaran pencapaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2017 disampaikan dalam uraian yang mencakup analisis capaian perjanjian kinerja yang telah diperjanjikan kepada Inspektur Jenderal.

Sekretariat Inspektorat Jenderal telah menyusun LAKIP Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2017 yang menyajikan hasil pengukuran atas capaian kinerja yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan Dukungan Manajemen Pengawasan.

Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2017 antara lain :

a. Realisasi anggaran

Pagu DIPA	:	Rp. 26.728.832.000,-	
Realisasi DIPA	:	Rp. 24.759.038.820,-	(92,63%)
Sisa Anggaran	:	Rp. 1.969.793.180,-	(7,37%)

b. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Penyelesaian temuan yang harus ditindaklanjuti berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian pada tahun 2017 sebanyak 1.550 rekomendasi dengan penyelesaian tindak lanjut sebanyak 1.424 rekomendasi (91,87%);

c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev).

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi, adalah Penyusunan / pengumpulan/ pengolahan/ updating /analisa data dan statistik. Program/kegiatan yaitu kegiatan evaluasi pelaksanaan program untuk perbaikan-perbaikan program di tahun-tahun mendatang;

d. Koordinasi Pengawasan

Koordinasi pengawasan dilakukan dengan unit kerja dan instansi terkait, antara lain koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam rangka

penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut hasil pemeriksaan;

- e. Pendampingan pengukuran kinerja guna migrasi manajemen mutu ISO 9001:2008 menjadi ISO 9001:2015 yang diperoleh pada tanggal 27 November 2017 dari perusahaan Intersys Training and Consulting;
- f. Ketatalaksanaan
Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat Jenderal telah melakukan penataan arsip di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian sesuai dengan ketentuan Arsip Nasional;
- g. Sistem Informasi
Dalam rangka pemberian informasi dan peningkatan pengetahuan dan kompetensi aparat pengawas intern Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian, diterbitkan Majalah Solusi yang telah diterbitkan sebanyak 2 (dua) kali penerbitan pada tahun 2017.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	I
RINGKASAN EKSEKUTIF	li
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR BAGAN	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR DIAGRAM	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	1
B. Peran Strategik Organisasi	1
C. Struktur Organisasi	2
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	6
A. Rencana Strategik Organisasi	6
B. Rencana Kinerja Tahun 2015	7
C. Dokumen Penetapan Kinerja	8
D. Rencana Anggaran	10
E. Rencana Aksi Program / Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2017	11
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Capaian Kinerja Organisasi	15
B. Akuntabilitas Keuangan	39
BAB IV : PENUTUP	42
A. Keberhasilan	42
B. Permasalahan / Kendala	43
C. Upaya dan Strategi Pemecahan	43
LAMPIRAN	

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal.....	3
Bagan 2 .Bagan Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal	3

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran, Indikator Dan Target Sekretariat Inspektorat Jenderal Pada Tahun 2017	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2. Sasaran kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2017.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. Alokasi Anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2017	12
Tabel 4. Aksi Program/Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2017.....	16
Tabel 5. Sasaran meningkatnya efektifitas, efisiensi dan ketaatan terhadap perundang-undangan	Error! Bookmark not defined.
Tabel 6. Capaian persentase satuan kerja yang telah menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 7. Perbandingan capaian persentase satuan kerja yang telah menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan 6 tahun terakhir.....	19
Tabel 8. Capaian tersedianya dokumen analisa dan pemantauan hasil pengawasan	20
Tabel 9. Perbandingan capaian tersedianya dokumen analisa dan pemantauan hasil pengawasan.....	21
Tabel 10. Capaian jumlah satuan kerja yang diusulkan menjadi WBK/WBBM	22
Tabel 11. Perbandingan capaian jumlah satuan kerja yang diusulkan menjadi WBK/WBBM.....	23
Tabel 12. Sasaran meningkatnya efektifitas pelaksanaan kebijakan program pengawasan internal.....	24
Tabel 13. Capaian tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran.....	24
Tabel 14. Perbandingan capaian tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran	25
Tabel 15. Capaian tersedianya dokumen evaluasi pelaksanaan program kerja	25
Tabel 16. Perbandingan capaian tersedianya dokumen evaluasi pelaksanaan program kerja	26
Tabel 17. Sasaran meningkatnya profesionalisme dan integritas aparatur Inspektorat Jenderal	26
Tabel 18. Capaian persentase auditor yang mengikuti penjenjangan auditor.....	27
Tabel 19. Perbandingan capaian persentase auditor yang mengikuti penjenjangan auditor	28
Tabel 20. Capaian persentase pegawai yang mendapatkan pelatihan.....	28
Tabel 21. Perbandingan capaian persentase pegawai yang mendapatkan pelatihan	29
Tabel 22. Capaian terlayannya urusan administrasi kepegawaian	30
Tabel 23. Sasaran terbangunnya organisasi yang efektif dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan internal	31
Tabel 24. Capaian Tersedianya media informasi Inspektorat Jenderal	31
Tabel 25. Capaian tersedianya dokumen kebijakan pengawasan	32
Tabel 26. Capaian persentase perbaikan SOP yang terupdate.....	33

Tabel 27. Perbandingan capaian persentase perbaikan SOP yang terupdate	35
Tabel 28. Capaian tersedianya laporan keuangan dan BMN.....	35
Tabel 29. Perbandingan capaian tersedianya laporan keuangan dan BMN.	36
Tabel 30. Capaian Tersedianya laporan pengawasan dan pengendalian BMN	36
Tabel 31. Perbandingan capaian Tersedianya laporan pengawasan dan pengendalian BMN.....	37
Tabel 32. Capaian terlayannya operasional ketatausahaan dan organisasi	37
Tabel 33. Capaian Triwulan Sasaran Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal	38
Tabel 34. Realisasi keuangan berdasarkan kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2017	42
Tabel 35. Alokasi dan Realisasi Anggaran per Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2017	43

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. Perbandingan Presentase Satuan Kerja yang telah menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan 6 tahun terakhir	19
Diagram 2. Perbandingan persentase capaian tersedianya dokumen analisa dan pemantauan hasil pengawasan	21
Diagram 3. Perbandingan persentase capaian jumlah satuan kerja yang diusulkan menjadi WBK/WBBM	23
Diagram 4. Perbandingan persentase capaian auditor yang mengikuti penjenjangan auditor	28
Diagram 5. Perbandingan persentase capaian pegawai yang mendapatkan pelatihan.....	30
Diagram 6. Perbandingan persentase capaian perbaikan SOP yang terupdate.....	35

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No.107/M-IND/PER/11/2015 Tanggal 30 November 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas pelayanan teknis dan administratif, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program;
2. koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data, pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan evaluasi serta pelaporan hasil pengawasan;
3. koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, sistem informasi, dan fasilitasi hubungan dengan instansi terkait; dan
4. pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, organisasi dan tata laksana, serta tata usaha.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan koordinasi, penyusunan rencana dan program kerja pengawasan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
- Pelaksanaan evaluasi atas laporan hasil pengawasan dan pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan serta pengawasan masyarakat;
- Pengelolaan urusan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- Pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, surat menyurat, dokumentasi, dan kearsipan.

B. PERAN STRATEJIK ORGANISASI

1. Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mempraktekan

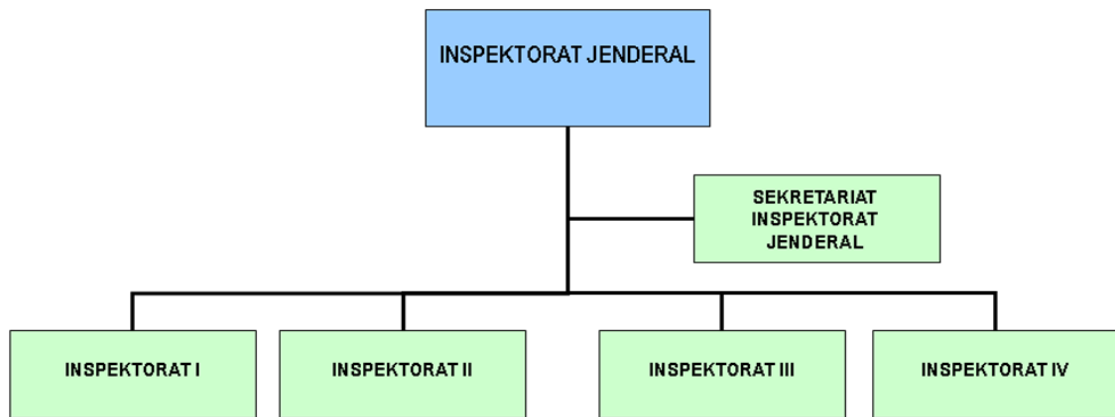
prinsip-prinsip *good governance*. Terwujudnya *good governance* merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna dan bebas KKN.

2. Dalam menyikapi perkembangan tersebut, Inspektorat Jenderal bertekad untuk menerapkan paradigma baru dimana pengawas berperan sebagai mitra manajemen dengan melakukan bimbingan, konsultasi, dan pendampingan untuk membantu pencapaian tujuan organisasi selain melaksanakan tugas-tugas pemeriksaan.
3. Untuk kelancaran pelaksanaan paradigma baru pengawasan sebagaimana dimaksud di atas, maka Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian memiliki peran strategis dalam memberikan dukungan manajemen dan peningkatan kapasitas kelembagaan Inspektorat Jenderal untuk penyelenggaraan pengawasan di lingkungan Kementerian Perindustrian.
4. Sekretariat Inspektorat Jenderal berperan untuk memfasilitasi implementasi paradigma baru pengawasan dengan berperan penyediaan sarana dan prasarana, memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dan penyediaan data dan informasi bahan pengawasan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan akuntabilitas pelaksanaan program serta peningkatan kapasitas SDM pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian.

C. STRUKTUR ORGANISASI

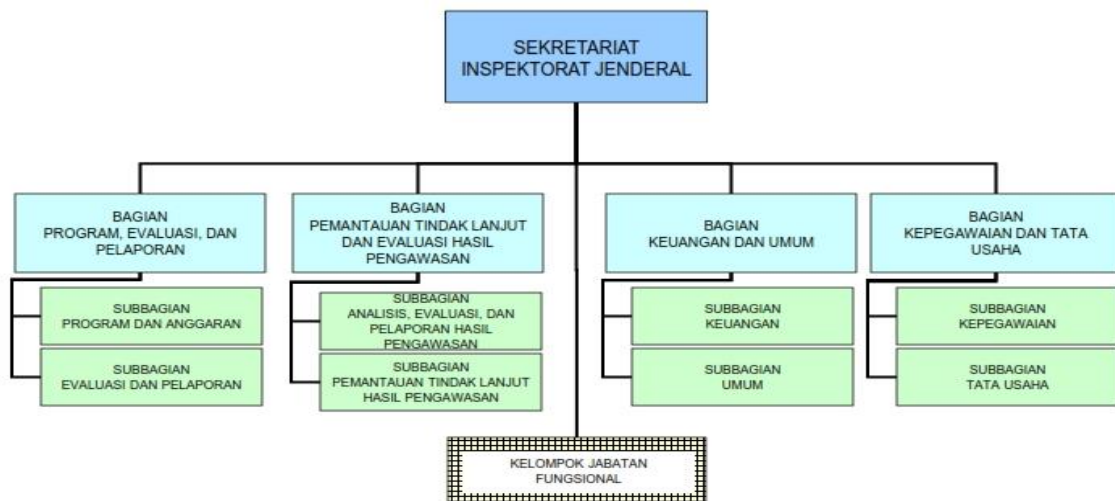
Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No.107/M-IND/PER/11/2015 Tanggal 30 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Organisasi Inspektorat Jenderal terdiri dari :

- 1 (satu) eselon I,
- 5 (lima) unit eselon II,
- 4 (empat) unit eselon III,
- 12 (dua belas) unit eselon IV,
- Kelompok jabatan fungsional auditor, dan fungsional arsiparis.



Bagan 1. Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal

Sementara itu struktur organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri dari :



Bagan 2 .Bagan Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sekretariat Itjen merupakan satu dari lima unit Eselon IV di lingkungan Inspektorat Jenderal, dengan susunan organisasi terdiri dari:

1. Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan.

Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program.

Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan; dan
- b. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program.

Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan terdiri atas:

1) Subbagian Program dan Anggaran.

Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan.

2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program.

2. Bagian Pemantauan Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Pengawasan.

Bagian Pemantauan Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data, pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan evaluasi serta pelaporan hasil pengawasan.

Bagian Pemantauan Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan evaluasi serta pelaporan hasil pengawasan; dan

b. Penyiapan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

Bagian Pemantauan Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Pengawasan terdiri atas:

1) Subbagian Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan Hasil Pengawasan.

Subbagian Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan evaluasi serta pelaporan hasil pengawasan.

2) Subbagian Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

Subbagian Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

3. Bagian Keuangan dan Umum.

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, sistem informasi, dan fasilitasi hubungan dengan instansi terkait.

Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai, akuntansi dan pengelolaan barang milik Inspektorat Jenderal; dan

b. Pelaksanaan urusan rumah tangga, sistem informasi, dan fasilitasi hubungan dengan instansi terkait.

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

1) Subbagian Keuangan.

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai, akuntansi dan pengelolaan barang milik inspektorat jenderal.

2) Subbagian Umum.

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, sistem informasi, dan fasilitasi hubungan dengan instansi terkait.

4. Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha.

Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, organisasi dan tata laksana, serta tata usaha.

Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai; dan
- b. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana, serta tata usaha.

Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha terdiri atas:

1) Subbagian Kepegawaian.

Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai.

2) Subbagian Tata Usaha.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan organisasi dan tata laksana, serta tata usaha.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI

Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagai unit pendukung penyelenggaraan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian telah menetapkan visi dan misi sebagai berikut :

VISI :

“Menjadi unit pendukung pengawasan yang profesional, berintegritas, kompeten dan akuntabel untuk mewujudkan kegiatan pengawasan sebagai penjamin mutu kegiatan pemerintahan di bidang industri”

dengan

MISI :

Melayani *stakeholder* secara profesional dengan :

1. Melaksanakan dukungan manajemen pengawasan intern dalam rangka mewujudkan tata kelola pengawasan yang baik;
2. Mengembangkan sistem pengawasan intern yang efisien dan efektif;
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya pengawas yang berintegritas, kompeten dan profesional.

Tujuan :

“Tercapainya layanan dan dukungan dalam penyelenggaraan pengawasan, untuk mendukung penyelenggaraan pengawasan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, bersih, dan bebas dari KKN”

Perencanaan stratejik Sekretariat Inspektorat Jenderal merupakan suatu komitmen dari serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pengawasan.

Adapun Indikator Kinerja Tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sebagai ukuran keberhasilan Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut :

Tabel 1, Indikator Kinerja Tujuan Sekretariat Inspektorat Jenderal

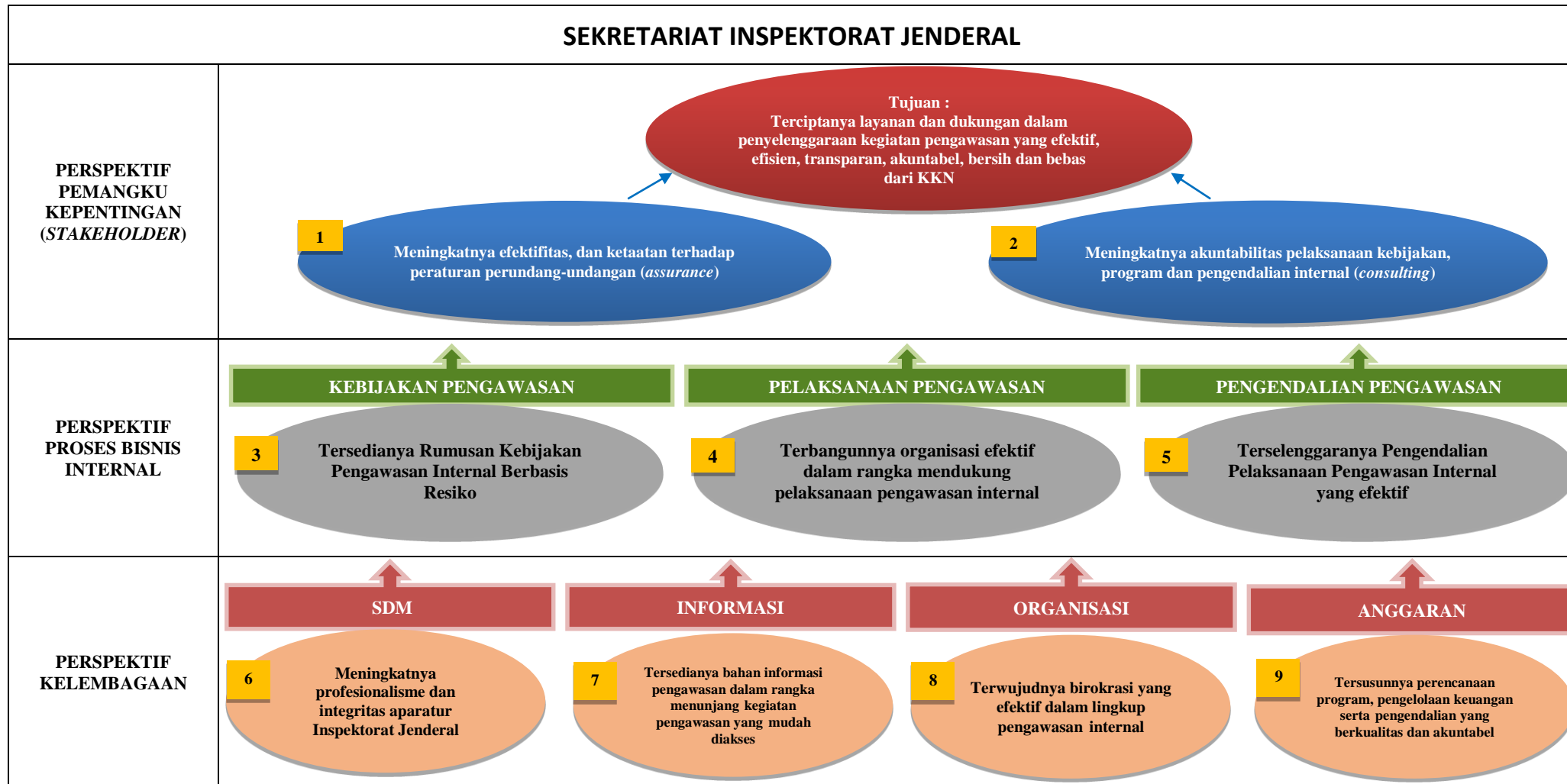
Kode Tujuan	Tujuan	Penjelasan Tujuan	Kode	Indikator Kinerja Tujuan	Penjelasan IKT	Satuan	Target		
							2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tj.1	Terciptanya layanan dan dukungan dalam penyelenggaraan kegiatan pengawasan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, bersih dan bebas dari KKN	Layanan dan dukungan dalam rangka kegiatan pengawasan	Tj 1.1	Level kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian	Penilaian BPKP terhadap kapabilitas APIP melalui sistem mutu pengawasan	Level	2	2	3
			Tj 1.2	Nilai Reformasi Birokrasi dari Kementerian PAN dan RB	Penilaian Kementerian PAN dan RB terhadap instansi pemerintah melalui 8 area perubahan	Nilai	85	90	95
			Tj 1.3	Inspektorat Jenderal berpredikat WBK/WBBM	Predikat WBK/WBBM atas penilaian Kementerian PAN dan RB	Predikat	-	-	WBK/WBBM
			Tj 1.4	Nilai Evaluasi AKIP Inspektorat Jenderal dari Kementerian PAN dan RB	Penilaian Kementerian PAN dan RB terhadap instansi pemerintah melalui 8 area perubahan	Nilai	A	A	A

Dalam upaya pencapaian visi dan misi tersebut maka strategi yang digunakan adalah melalui program **”Peningkatan peran pelayanan pengawasan yang handal”** yang diturunkan menjadi kegiatan **”Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal”** dengan sasaran program:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja;
2. Meningkatnya profesionalisme dan integritas aparatur pengawas;
3. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
4. Meningkatnya penerapan pengendalian internal;
5. Meningkatnya pembinaan konsultasi pengawasan;
6. Berkembangnya kemampuan APIP;
7. Terbangunnya organisasi efektif.
8. Terbangunnya sistem informasi yang terintegrasi dan handal.
9. Meningkatnya perencanaan dan penganggaran yang berkualitas

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2017

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Sekretariat Inspektorat Jenderal pada Tahun 2017 melaksanakan kegiatan **”Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal”** Dengan membuat perencanaan kinerja yang disusun pada bulan Juni 2016 dengan sasaran, indikator dan target tertuang pada tabel berikut:



Bagan 3. Peta Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal

Tabel 2. Sasaran Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder (S)			
1	Meningkatnya Efektifitas, Dan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan (<i>Assurance</i>)	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran	1 dokumen
		Tersedianya dokumen evaluasi pelaksanaan program kerja Inspektorat Jenderal	3 dokumen
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Pengendalian Eksternal (<i>consulting</i>)	Persentase satuan kerja yang telah menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan	87%
		Tersedianya dokumen analisa dan pemantauan hasil pengawasan	4 dokumen
		Jumlah satuan kerja yang diusulkan menjadi WBK/WBBM	12 satuan kerja
Perspektif Proses Bisnis Internal			
1	Tersedianya Rumusan Kebijakan Pengawasan Internal Berbasis Resiko	Tersedianya kebijakan pengawasan tahun yang akan datang berbasis resiko	1 peraturan
		Tersedianya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis resiko	1 peraturan
2	Terbangunnya Organisasi Efektif Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Pengawasan Internal	Tersedianya media informasi Inspektorat Jenderal	2 layanan
		Tersedianya dokumen kebijakan pengawasan	1 dokumen
		Persentase perbaikan SOP	30 persen
		Tersedianya Laporan Keuangan dan BMN	1 dokumen
		Tersedianya Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN	1 dokumen
		Terlayannya operasional ketatausahaan dan organisasi	12 bulan
3	Terselenggaranya pengendalian pelaksanaan pengawasan internal yang efektif	Persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan	85%
Perspektif Kelembagaan			
1	Meningkatnya profesionalisme dan integritas aparatur Inspektorat Jenderal	Persentase AP/IP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai kebutuhan organisasi	90%
		Persentase auditor yang mendapatkan diklat penjenjangan sesuai dengan kebutuhan	10%

		Terlayannya urusan administrasi kepegawaian	12 bulan
2	Terwujudnya birokrasi yang efektif dalam lingkup pengawasan internal	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	AA
		Level maturitas SPIP Inspektorat Jenderal	3
3	Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel	Akuntabilitas laporan keuangan dan BMN	Standar Capaian
		Persentase anggaran Inspektorat Jenderal yang di blokir	10%
		Persentase status pengelolaan BMN Inspektorat Jenderal	90%
		Persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan dengan dokumen perencanaan melalui aplikasi ALKI	90%

C. DOKUMEN PENETAPAN KINERJA

Rencana kinerja pada tabel di atas dilakukan pembahasan kembali pada awal tahun 2017 untuk dijadikan Perjanjian Kinerja (Perkin) 2017 sesuai dengan amanat Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi. Pada tahun 2017, dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Sekretariat Inspektorat Jenderal telah menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja dan target berdasarkan hasil pembahasan terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan sehingga terdapat sasaran yang telah direncanakan pada tahun 2015 mengalami perubahan dalam perjanjian kinerja pada tahun 2017 sehingga menjadi :

Tabel 3. Sasaran Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan ketaatan terhadap perundang-undangan	Persentase satuan kerja yang telah menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan	87 %
		Tersedianya dokumen analisa dan pemantauan hasil pengawasan	4 Paket Dokumen
		Jumlah satuan kerja yang diusulkan menjadi WBK/WBBM	12 Satuan Kerja
2.	Meningkatnya efektifitas pelaksanaan kebijakan program pengawasan internal	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran	1 Dokumen
		Tersedianya dokumen evaluasi pelaksanaan program kerja Inspektorat Jenderal	3 Paket Dokumen
3.		Persentase auditor yang mengikuti penjenjangan auditor	10 %

	Meningkatnya profesionalisme dan integritas aparatur Inspektorat Jenderal	Persentase pegawai yang mendapatkan pelatihan	90 %
		Terlayannya urusan administrasi kepegawaian	12 Bulan
4.	Terbangunnya organisasi yang efektif dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan internal	Tersedianya media informasi Inspektorat Jenderal	2 Layanan
		Tersedianya dokumen kebijakan pengawasan	1 Dokumen
		Persentase perbaikan SOP	30 %
		Tersedianya Laporan Keuangan dan BMN	1 Dokumen
		Tersedianya Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN	1 Dokumen
		Terlayannya operasional ketatausahaan dan organisasi	12 Bulan

D. RENCANA ANGGARAN

Dalam tahun 2017, Sekretariat Inspektorat Jenderal memperoleh alokasi anggaran awal sebesar Rp.29.987.872.000,- kemudian setelah dilakukan pemotongan anggaran menjadi Rp.27.517.095.000,- dan dilanjutkan dengan pemotongan terakhir menjadi Rp.26.728.832.000,-.mengalami revisi anggaran pada tiap-tiap kegiatan dalam pelaksanaannya. Dengan alokasi anggaran sebagai berikut :

Tabel 4. Alokasi Anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2017

NO	KODE	KEGIATAN	VOLUME		ANGGARAN		
					SEBELUM REVISI	REVISI AWAL	REVISI AKHIR
1	1845.001	Layanan Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Hasil Pengawasan [Base Line]	194	Laporan	1.826.967.000	1.623.341.000	1.545.336.000
2	1845.002	Layanan Laporan Norma/Standar/Pedoman/Ketentuan Pengawasan [Base Line]	94	Laporan	238.500.000	223.320.000	610.616.000
3	1845.003	Layanan Dukungan Pengawasan dan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Lainnya [Base Line]	1	Layanan	4.177.920.000	1.054.820.000	1.000.820.000
4	1845.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I [Base Line]	128	Layanan	5.663.327.000	4.301.697.000	4.016.660.000
5	1845.951	Layanan Internal (Overhead) [Base Line]	1	Layanan	1.502.920.000	2.414.997.000	1.829.400.000
6	1845.994	Layanan Perkantoran [Base Line]	12	Bulan	16.306.358.000	17.627.040.000	17.454.120.000
7	1845.999	Output Cadangan [Base Line]	1	Cadangan	271.880.000	271.880.000	271.880.000
TOTAL ANGGARAN					29.987.872.000	27.517.095.000	26.728.832.000

E. Rencana Aksi Program/Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2017

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2017, sasaran yang akan diwujudkan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Rencana Aksi Program/Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2017

Rencana Aksi Program/Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2017											
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan Yang Dilaksanakan	Anggaran	Target Total	Tahun 2017					
						Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Penanggung Jawab	Pelaksana
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Ketataan Terhadap Perundang-Undangan	Persentase Satuan Kerja Yang Telah Menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	- Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan - Forum Koordinasi Data Hasil Pemeriksaan Internal	Rp.1.383.506.000	87%	- Satuan Kerja Yang Telah Menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Sebanyak 5 %	- Satuan Kerja Yang Telah Menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Sebanyak 5 %	- Satuan Kerja Yang Telah Menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Sebanyak 20 %	- Satuan Kerja Yang Telah Menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Sebanyak 57 %	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Seluruh Pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal
		Tersedianya Dokumen Analisa Dan Pemantauan Hasil Pengawasan	- Analisis Dan Evaluasi Pelaporan Hasil Pengawasan - Pembinaan Dan Pengawasan Inspektorat Jenderal	Rp. 594.020.000,-	4 Paket Dokumen	- Tersedia 1 Laporan Apip Tahun 2016	Pengumpulan Data Untuk Draft Laporan Apip Semester I Tahun 2017	- Tersedia 1 Laporan Berupa Laporan Apip Semester I Tahun 2017	- Tersedia 2 Laporan Berupa Laporan Analisis Dan Evaluasi	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Seluruh Pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal
		Jumlah Satuan Kerja Yang Diusulkan Menjadi Wbk/Wbbm	- Pelayanan Konsultasi Dan Penguatan Pengawasan Inspektorat Jenderal	Rp.568,630,000,-	12 Satuan Kerja	- Persiapan	- Terdapat 2 Satuan Kerja Yang Diusulkan	- Terdapat 5 Satuan Kerja Yang Diusulkan	- Terdapat 5 Satuan Kerja Yang Diusulkan	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Seluruh Pegawai Inspektorat Jenderal
2.	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Program Pengawasan Internal	Tersedianya Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran - Penyusunan Perjanjian Kinerja Dan Rencana Kerja	Rp.971,432,000,-	1 Dokumen	- Dokumen (Pagu Defenitif, Satuan 3 B Dan Rka-K/L) - Perjanjian Kinerja Tahun 2017	- Membuat Draft Renja Tahun 2018 Dan Draft Pagu Indikatif Tahun 2018	- Membuat Draft Pagu Anggaran Tahun 2018 - Dokumen Rencana Kinerja 2018	- Tersedianya Dokumen Dipa Ta 2018 Dan Draft Pkpt Berbasis Resiko Tahun 2018	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Seluruh Pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal

Rencana Aksi Program/Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2017

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan Yang Dilaksanakan	Anggaran	Target Total	Tahun 2017					
						Triwulan I	Triwulan li	Triwulan liii	Triwulan Iv	Penanggung Jawab	Pelaksana
		Tersedianya Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja Inspektorat Jenderal	- Evaluasi Pelaksanaan Program Pengawasan Inspektorat Jenderal	Rp.814,240,000,-	3 Paket Dokumen	- 3 Paket Dokumen (Lakip Es. 1 Dan 2, Laporan Pp 39 Tw Iv Tahun 2016 Es. 1 Dan 2)	- 1 Paket Dokumen (Laporan Pp 39 Tw I Tahun 2017 Es. 1 Dan 2)	- 1 Paket Dokumen (Laporan Pp 39 Tw li Tahun 2017 Es. 1 Dan 2)	- 1 Paket Dokumen (Laporan Pp 39 Tw lii Tahun 2017 Es. 1 Dan 2)	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Seluruh Pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal
3.	Meningkatnya Profesionalisme Dan Integritas Aparatur Inspektorat Jenderal	Persentase Auditor Yang Mengikuti Diklat Penjenjangan Auditor	- Workshop Reviu Laporan Keuangan Dan Bmn Berbasis Akrual	Rp.153,417,000,-	10%	- Persiapan Workshop Reviu Laporan Keuangan Dan Bmn Berbasis Akrual	- Workshop Reviu Laporan Keuangan Dan Bmn Berbasis Akrual Direncanakan Bulan April 2017	- Penyelesaian Pertanggungjawaban Workshop Reviu Laporan Keuangan Dan Bmn Berbasis Akrual	-	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Seluruh Pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal
		Persentase Pegawai Yang Mendapatkan Pelatihan	- Koordinasi Pengembangan Sdm - Kegiatan Capacity Building Pegawai Itjen - Diklat Pengembangan Sdm Itjen - Assesment Asn Itjen	Rp. 848,433,000,-	90%	- Direncanakan Pelaksanaan Capacity Building Bulan Maret 2017	- Penyelesaian Pertanggungjawaban Kegiatan Capacity Building	- Direncanakan Pelaksanaan Pengembangan Diklat Pengembangan Sdm Itjen Bulan Juli-Desember 2017	- Direncanakan Pelaksanaan Diklat Pengembangan Sdm Itjen Dan Bulan Juli-Desember 2017 Sedangkan Assesment Asn Pada Bulan Desember 2017	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Seluruh Pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal
		Terlayannya Urusan Administrasi Kepegawaian	- Penatausahaan Urusan Kepegawaian	Rp.293,580,000,-	12 Bulan	- Terlayannya Urusan Kepegawaian Selama 3 Bulan	- Terlayannya Urusan Kepegawaian Selama 3 Bulan	- Terlayannya Urusan Kepegawaian Selama 3 Bulan	- Terlayannya Urusan Kepegawaian Selama 3 Bulan	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Seluruh Pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal
4.	Terbangunnya Organisasi Yang Efektif Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Pengawasan Internal	Tersedianya Media Informasi Inspektorat Jenderal	- Penataan Sistem Informasi - Penyusunan Majalah Solusi	Rp.194,950,000,-	2 Layanan	-Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan Online (Spi) - Penyusunan Majalah Solusi Semester I Tahun 2017	- Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan Online (Spi) - Penerbitan Majalah Solusi Semester I Tahun 2017	- Tersedianya Aplikasi Online Spi - Penyusunan Majalah Solusi Semester li Tahun 2017	- Penerbitan Majalah Solusi Semester li Tahun 2017	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Seluruh Pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal

Rencana Aksi Program/Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2017

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan Yang Dilaksanakan	Anggaran	Target Total	Tahun 2017					
						Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Penanggung Jawab	Pelaksana
		Tersedianya Dokumen Kebijakan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Dalam Rangka Penyusunan Pedoman Kebijakan Pengawasan - Fgd Penyusunan Konsep Pedoman Dan Kebijakan Pengawasan (4 Pedoman Pengawasan) - Fgd Penyusunan Konsep Pedoman Dan Kebijakan Pengawasan Lainnya 	Rp.387,296,000,-	1dokumen	- Persiapan	- Persiapan	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Dalam Rangka Penyusunan Pedoman Kebijakan Pengawasan - Fgd Penyusunan Konsep Pedoman Dan Kebijakan Pengawasan (4 Pedoman Pengawasan) - Fgd Penyusunan Konsep Pedoman Dan Kebijakan Pengawasan Lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Dengan Biro Hukum & Organisasi Untuk Penerbitan Permenperin - Koordinasi Dengan Ir I – Ir Iv 	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Seluruh Pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal
		Persentase Perbaikan Sop	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Dalam Rangka Penyusunan Sop Dan Penilaian Sistem Manajemen Mutu (Smm) - Evaluasi Penerapan Smm - Reviu/Audit Internal Penerapan Smm - Audit Surveillance Smm -Penyusunan /Penyempurnaan Sop 	Rp.223.320,000,-	30%	- Persiapan	- Koordinasi Dalam Rangka Penyusunan Sop Dan Penilaian Sistem Manajemen Mutu (Smm)	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Evaluasi Penerapan Smm - Pelaksanaan Reviu/Audit Internal Penerapan Smm -Penyusunan /Penyempurnaan Sop 	- Audit Surveillance Smm	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Seluruh Pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal
		Tersedianya Laporan Keuangan Dan Bmn	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan Dan Bmn - Penyusunan Laporan Keuangan Dan Bmn 	Rp.339,790,000,-	1 Dokumen	- 1 Laporan Keuangan Dan Bmn Semester 2 Ta 2016	- Pengumpulan Data Bahan Laporan Keuangan Dan Bmn Semester 1 Ta 2017	- 1 Laporan Keuangan Dan Bmn Semester 1 Ta 2017	- Pengumpulan Data Bahan Laporan Keuangan Dan Bmn Semester 2 Ta 2017	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Seluruh Pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal

Rencana Aksi Program/Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2017

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan Yang Dilaksanakan	Anggaran	Target Total	Tahun 2017					
						Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Penanggung Jawab	Pelaksana
		Tersedianya Laporan Pengawasan Dan Pengendalian Bmn	- Penyusunan Laporan Pengawasan Dan Pengendalian Inspektorat Jenderal	Rp. 24,200,000,-	1 Dokumen	- 1 Laporan Pengawasan Dan Pengendalian Bmn Ta 2016	- Pengumpulan Data Bahan Pengawasan Dan Pengendalian Bmn Ta 2017	- Pengumpulan Data Bahan Pengawasan Dan Pengendalian Bmn Ta 2017	- Pengumpulan Data Bahan Pengawasan Dan Pengendalian Bmn Ta 2017	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Seluruh Pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal
		Terlayannya Operasional Ketatausahaan Dan Organisasi	- Peningkatan Budaya Kerja Melalui Implementasi 5 K - Penataan Ketatausahaan Dan Arsip Inspektorat Jenderal	Rp.376,618,000,-	12 Bulan	- Terlayannya Urusan Organisasi Dan Tata Laksana Selama 3 Bulan	- Terlayannya Urusan Organisasi Dan Tata Laksana Selama 3 Bulan	- Terlayannya Urusan Organisasi Dan Tata Laksana Selama 3 Bulan	- Terlayannya Urusan Organisasi Dan Tata Laksana Selama 3 Bulan	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Seluruh Pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal

BAB III.

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban Sekretaris Inspektorat Jenderal kepada Inspektur Jenderal dan pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya mengenai fasilitasi/ layanan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pokok Kementerian Perindustrian pada tahun 2017. Penilaian atas pelaksanaan tugas Sekretariat Inspektorat Jenderal dilakukan melalui pengukuran kinerja.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Secara umum Sekretariat Inspektorat Jenderal telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No.107/M-IND/PER/11/2015 Tanggal 30 November 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, yang merupakan tanggung jawab organisasi. Berdasarkan evaluasi capaian kinerja terhadap sasaran yang telah ditetapkan, ***pencapaian kinerja kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2017*** sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi, Sekretariat Inspektorat Jenderal telah menyusun rencana aksi dalam rangka mencapai sasaran perjanjian kinerja yang dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Rincian analisis capaian masing-masing sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam penetapan kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas dan ketaatan terhadap perundang-undangan

Pada sasaran ini terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2017, yaitu :

Tabel 6. Sasaran meningkatnya efektifitas, efisiensi dan ketaatan terhadap perundang-undangan

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan ketaatan terhadap perundang-undangan	Persentase satuan kerja yang telah menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan	87 %	91,87%	105,60
		Tersedianya dokumen analisa dan pemantauan hasil pengawasan	4 Paket Dokumen	4 Paket Dokumen	100
		Jumlah satuan kerja yang diusulkan menjadi WBK/WBBM	12 Satuan Kerja	10 Satuan Kerja	83,33

a. Persentase satuan kerja yang telah menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan.

Indikator ini merupakan salah satu **Indikator Kinerja Utama (IKU)**. Capaian indikator ini dihitung dengan membandingkan antara realisasi dan target yang ditetapkan sebesar **87%**. Rincian indikator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 7. Capaian Persentase Satuan Kerja Yang Telah Menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan ketaatan terhadap perundang-undangan	Persentase satuan kerja yang telah menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan	87 %	91,87%	105,60

- Capaian Sasaran Program/Kegiatan meningkatnya akuntabilitas dan ketaatan terhadap perundang-undangan dengan indikator persentase satuan kerja yang telah menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan dengan target 87 persen.

Jika dibandingkan capaian realisasi dan target maka pencapaian indikator adalah sebesar 91,87 %.

Pencapaian sasaran tiap triwulan adalah sebagai berikut :

- Triwulan I tercapai hingga sebesar 6,19%
 - Triwulan II tercapai hingga sebesar 26,52%
 - Triwulan III tercapai hingga sebesar 55,81%
 - Triwulan IV tercapai hingga sebesar 91,87%
- Nilai persentase diperoleh dari persentase telah diselesaikannya 1424 rekomendasi dari 1550 rekomendasi hasil audit internal Inspektorat Jenderal pada tahun 2017.
- Sasaran pada tahun 2017 dapat melampaui target yang ditetapkan, selain karena adanya pemantauan penyelesaian tindak lanjut yang dilakukan ke tiap satuan kerja, juga didukung dengan pelaksanaan rapat koordinasi penyelesaian tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal di Tangerang tanggal 4-5 Mei 2017 dengan mengundang satuan kerja unit pusat maupun unit kerja vertikal di lingkungan Kementerian Perindustrian.
- Capaian realisasi pada tahun 2017 mengalami kenaikan dibanding tahun tahun sebelumnya. Realisasi capaian sasaran pada 5 tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 8. Perbandingan Capaian Persentase Satuan Kerja Yang Telah Menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 6 Tahun Terakhir

Perbandingan Capaian	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
Persentase satuan kerja yang telah menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan	82,35 %	85,8 %	86,44 %	86,35 %	88,55 %	91,87 %

Diagram 1. Perbandingan Presentase Satuan Kerja yang telah menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan 6 tahun terakhir

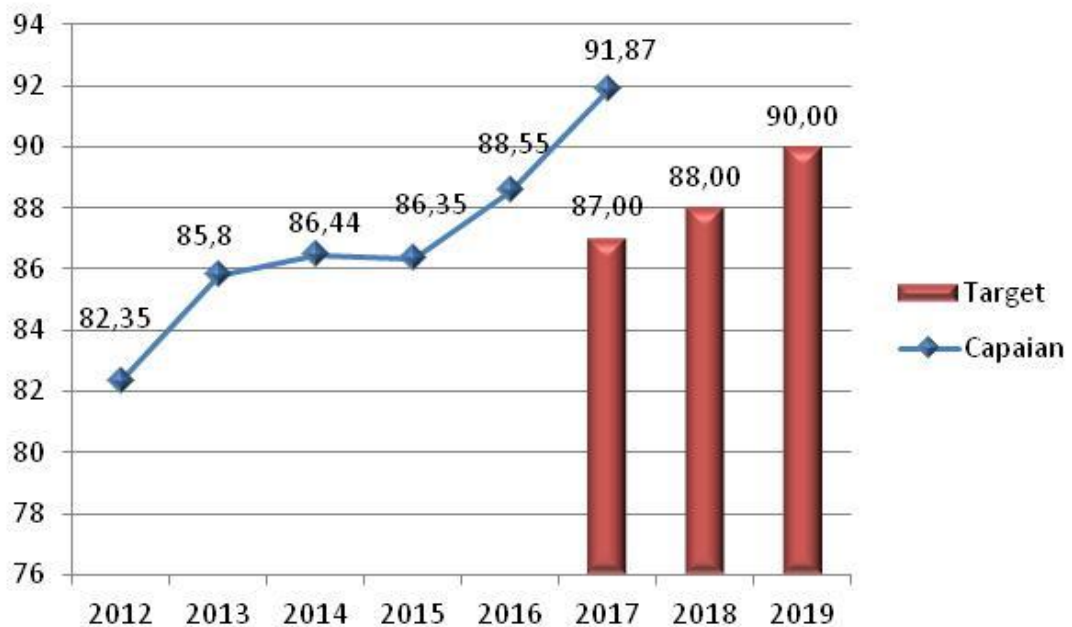


Diagram 2. Perbandingan Presentase Satuan Kerja yang telah menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan 6 tahun terakhir

Diagram di atas menunjukkan capaian presentase satuan kerja yang telah menyelesaikan tindak lanjut dalam periode 6 tahun terakhir beserta target penyelesaian tindak lanjut hingga tahun 2019. Pada tahun 2017, capaian penyelesaian tindak lanjut jauh melebihi target yang telah ditentukan. Dengan melihat fakta ini, maka Inspektorat Jenderal yakin dapat mencapai target presentase satuan kerja yang telah menyelesaikan tindak lanjut pada tahun 2018 dan 2019.

b. Tersedianya dokumen analisa hasil pengawasan

Capaian indikator ini diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi yang telah ditetapkan yaitu 4 Paket Dokumen. Rincian indikator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 9. Capaian tersedianya dokumen analisa dan pemantauan hasil pengawasan

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan ketaatan terhadap perundang-undangan	Tersedianya dokumen analisa dan pemantauan hasil pengawasan	4 Paket Dokumen	4 Paket Dokumen	100

- Capaian Sasaran Program/Kegiatan meningkatnya akuntabilitas dan ketaatan terhadap perundang-undangan dengan indikator tersedianya dokumen analisa hasil pengawasan dengan target 4 Dokumen.
Jika dibandingkan capaian realisasi dan target maka pencapaian indikator adalah sebesar 4 Dokumen.
Pencapaian sasaran tiap triwulan adalah sebagai berikut :
 - Triwulan I tercapai hingga sebesar 1 Dokumen
 - Triwulan II tercapai hingga sebesar 1 Dokumen
 - Triwulan III tercapai hingga sebesar 2 Dokumen
 - Hingga Triwulan IV tercapai hingga sebesar 4 Dokumen
- Dokumen tersebut berupa Laporan APIP Tahun 2016, Laporan APIP Semester 1 Tahun 2017, Laporan Zona Integritas dan Laporan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
- Capaian realisasi pada tahun 2017 mengalami kenaikan di banding tahun sebelumnya. Realisasi capaian sasaran pada tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 10. Perbandingan capaian tersedianya dokumen analisa dan pemantauan hasil pengawasan

PERBANDINGAN CAPAIAN	TAHUN 2016	TAHUN 2017
Tersedianya dokumen analisa dan pemantauan hasil pengawasan	66,7%	100%

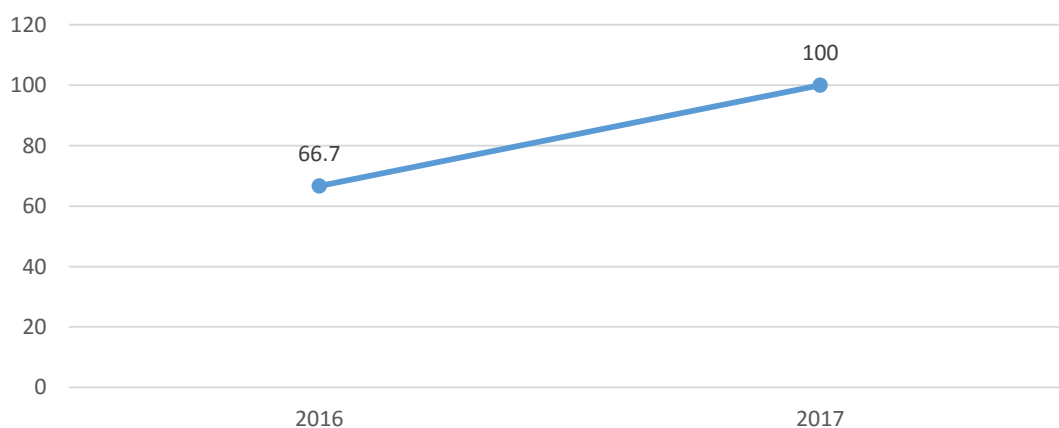


Diagram 3. Perbandingan persentase capaian tersedianya dokumen analisa dan pemantauan hasil pengawasan

c. Jumlah satuan kerja yang diusulkan menjadi WBK/WBBM

Indikator ini merupakan salah satu **Indikator Kinerja Utama (IKU)**. Capaian indikator ini diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi yang telah ditetapkan yaitu 12 Satuan Kerja.

Rincian indikator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 11. Capaian jumlah satuan kerja yang diusulkan menjadi WBK/WBBM

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan ketaatan terhadap perundang-undangan	Jumlah satuan kerja yang diusulkan menjadi WBK/WBBM	12 Satuan Kerja	10 Satuan Kerja	83,33

- Capaian Sasaran Program/Kegiatan meningkatnya akuntabilitas dan ketaatan terhadap perundang-undangan dengan indikator jumlah satuan kerja yang diusulkan menjadi WBK/WBBM dengan target 12 Satuan Kerja.

Jika dibandingkan capaian realisasi dan target maka pencapaian indikator adalah sebesar 10 Satuan Kerja.

Pencapaian sasaran tiap triwulan adalah sebagai berikut :

- Triwulan I belum dapat diukur
 - Triwulan II tercapai hingga sebesar 5 satuan kerja
 - Triwulan III tercapai hingga sebesar 5 satuan kerja
 - Hingga Triwulan IV tercapai hingga sebesar 10 satuan kerja
- Jumlah satuan kerja yang diusulkan ke Kementerian PAN dan RB sebanyak 10 satuan kerja yaitu Baristand Samarinda, BDI Makassar, BBKK Jakarta, SMAK Bogor, BBT PPI Semarang, BBPK Bandung, BDI Surabaya, BBK Bandung, BBKB Yogyakarta dan SMAK Makassar.
 - Dari 10 satuan kerja yang diusulkan ke Kementerian PAN dan RB, 4 satuan kerja Kementerian Perindustrian berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian PAN dan RB yaitu SMAK Bogor, BBT PPI Semarang, Baristand Samarinda dan BDI Surabaya.
 - Capaian realisasi pada tahun 2017 mengalami kenaikan di banding tahun sebelumnya. Realisasi capaian sasaran pada tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 42. Perbandingan capaian jumlah satuan kerja yang diusulkan menjadi WBK/WBBM

PERBANDINGAN CAPAIAN	TAHUN 2016	TAHUN 2017
Jumlah satuan kerja yang diusulkan menjadi WBK/WBBM	50%	83,33%

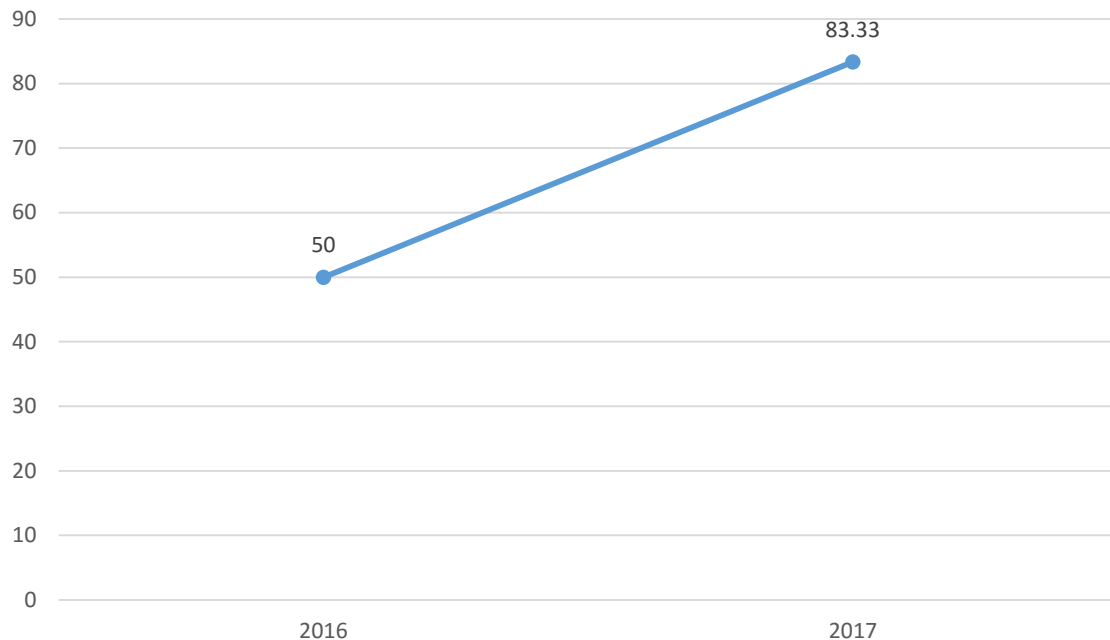


Diagram 4. Perbandingan persentase capaian jumlah satuan kerja yang diusulkan menjadi WBK/WBBM

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2017 capaian jumlah satuan kerja yang diusulkan menjadi WBK/WBBM mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016. Pada periode selanjutnya Inspektorat Jenderal berharap akan lebih banyak lagi satuan kerja yang dapat memperoleh predikat WBK/WBBM demi terciptanya pelayanan publik yang semakin berkualitas dan berintegritas serta sebagai bentuk pertanggungjawaban Inspektorat Jenderal kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Meningkatnya efektifitas pelaksanaan kebijakan program pengawasan internal

Pada sasaran ini terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2017, yaitu :

Tabel 53. Sasaran Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Program Pengawasan Internal

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
2.	Meningkatnya efektifitas pelaksanaan kebijakan program pengawasan internal.	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Tersedianya dokumen evaluasi pelaksanaan program kerja Inspektorat Jenderal	3 Paket Dokumen	3 Paket Dokumen	100

a. Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran.

Capaian indikator ini diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target yang ditetapkan yaitu 1 Dokumen.

Rincian indikator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 64. Capaian Tersedianya Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
2.	Meningkatnya efektifitas pelaksanaan kebijakan program pengawasan internal	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	100

- Capaian Sasaran Program/Kegiatan meningkatnya efektifitas pelaksanaan kebijakan program pengawasan internal dengan indikator tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran dengan target 1 dokumen.

Jika dibandingkan capaian realisasi dan target maka pencapaian indikator adalah sebesar 1 dokumen.

Pencapaian sasaran tiap triwulan adalah sebagai berikut :

- Triwulan I belum dapat diukur
- Triwulan II belum dapat diukur
- Triwulan III belum dapat diukur
- Hingga Triwulan IV tercapai hingga sebesar 1 dokumen

- Dokumen perencanaan dan penganggaran adalah DIPA TA 2018 yang terbit pada tanggal 5 Desember 2017 dengan No.SP DIPA-019.06.1.247885/2018.
- Capaian realisasi pada tahun 2017 tidak mengalami penurunan di banding tahun sebelumnya, dikarenakan setiap tahunnya harus tersedia dokumen perencanaan dan penganggaran. Realisasi capaian sasaran pada tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 75. Perbandingan Capaian Tersedianya Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran

PERBANDINGAN CAPAIAN	TAHUN 2016	TAHUN 2017
Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran	100%	100%

b. Tersedianya dokumen evaluasi pelaksanaan program kerja Inspektorat Jenderal

Capaian indikator ini diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target yang ditetapkan yaitu sebanyak 3 Paket Dokumen.

Rincian indikator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 86. Capaian Tersedianya Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja Inspektorat Jenderal

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
2.	Meningkatnya efektifitas pelaksanaan kebijakan program pengawasan internal	Tersedianya dokumen evaluasi pelaksanaan program kerja Inspektorat Jenderal	3 Paket Dokumen	3 Paket dokumen	100

- Capaian Sasaran Program/Kegiatan meningkatnya efektifitas pelaksanaan kebijakan program pengawasan internal dengan indikator tersedianya dokumen evaluasi pelaksanaan program kerja Inspektorat Jenderal dengan target 3 paket dokumen.

Jika dibandingkan capaian realisasi dan target maka pencapaian indikator adalah sebesar 3 paket dokumen.

Pencapaian sasaran tiap triwulan adalah sebagai berikut :

- Triwulan I tercapai sebesar 3 dokumen
 - Triwulan II tercapai hingga sebesar 1 paket dokumen
 - Triwulan III tercapai hingga sebesar 1 paket dokumen
 - Hingga Triwulan IV tercapai sebesar 3 paket dokumen
- Dokumen evaluasi pelaksanaan program kerja Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut :
- Laporan PP39 TW I Tahun 2017 Es.I dan Es.II
 - Laporan PP39 TW II Tahun 2017 Es.I dan Es.II
 - Laporan PP39 TW III Tahun 2017 Es.I dan Es.II
- Capaian realisasi pada tahun 2017 tidak mengalami penurunan di banding tahun sebelumnya, dikarenakan setiap tahunnya wajib tersedianya laporan evaluasi pelaksanaan program kerja Inspektorat Jenderal, berikut adalah perbandingan realisasi capaian sasaran pada tahun sebelumnya :

Tabel 97. Perbandingan capaian tersedianya dokumen evaluasi pelaksanaan program kerja Inspektorat Jenderal

PERBANDINGAN CAPAIAN	TAHUN 2016	TAHUN 2017
Tersedianya dokumen evaluasi pelaksanaan program kerja Inspektorat Jenderal	100%	100%

3. Meningkatnya profesionalisme dan integritas aparatur Inspektorat Jenderal

Pada sasaran ini terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2017, yaitu :

Tabel 108. Sasaran meningkatnya profesionalisme dan integritas aparatur Inspektorat Jenderal

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
3.	Meningkatnya profesionalisme dan	Persentase auditor yang mengikuti penjenjangan auditor	10%	10,22%	104,4

	integritas aparatur Inspektorat Jenderal	Persentase pegawai yang mendapatkan pelatihan	90%	94,55%	105,05
		Terlayannya urusan administrasi kepegawaian	12 Bulan	12 bulan	100

a. Persentase auditor yang mengikuti penjenjangan auditor.

Capaian indikator ini diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target yang ditetapkan sebesar 10%.

Rincian indikator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 119. Capaian Persentase Auditor Yang Mengikuti Penjenjangan Auditor

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
3.	Meningkatnya profesionalisme dan integritas aparatur Inspektorat Jenderal	Persentase auditor yang mengikuti penjenjangan auditor	10%	10,22%	104,4

- Capaian Sasaran Program/Kegiatan meningkatnya profesionalisme integritas aparatur pengawas dengan indikator persentase auditor yang mengikuti diklat penjenjangan auditor dengan target 10%.
Jika dibandingkan capaian realisasi dan target maka pencapaian indikator adalah sebesar 10,22% Satuan Kerja.
Pencapaian sasaran tiap triwulan adalah sebagai berikut :
 - Triwulan I belum dapat diukur
 - Triwulan II belum dapat diukur
 - Triwulan III tercapai hingga sebesar 10,22%
 - Hingga Triwulan IV tercapai sebesar 10,22%
- Diklat penjenjangan auditor diikuti oleh 5 auditor dari total 49 auditor, 4 auditor diantaranya mengikuti diklat auditor muda dan 1 auditor mengikuti diklat auditor madya.

- Capaian realisasi pada tahun 2017 ini, mengalami peningkatan dari realisasi tahun sebelumnya. Berikut adalah perbandingan realisasi capaian pada tahun sebelumnya :

Tabel 2012. Perbandingan Capaian Persentase Auditor Yang Mengikuti Penjenjangan Auditor

PERBANDINGAN CAPAIAN	TAHUN 2016	TAHUN 2017
Persentase auditor yang mengikuti penjenjangan auditor	95%	104,4

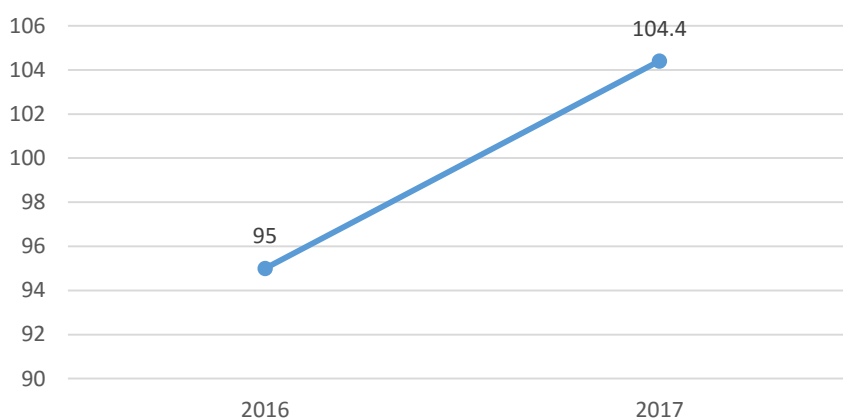


Diagram 5. Perbandingan persentase capaian auditor yang mengikuti penjenjangan auditor

b. Persentase pegawai yang mendapatkan pelatihan.

Capaian indikator ini diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target yang ditetapkan sebesar 90%.

Rincian indikator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 21. Capaian Persentase Pegawai Yang Mendapatkan Pelatihan

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
3.	Meningkatnya profesionalisme dan integritas aparatur Inspektorat Jenderal	Persentase pegawai yang mendapatkan pelatihan	90%	94,55%	105,05

- Capaian Sasaran Program/Kegiatan meningkatnya profesionalisme dan integritas aparatur Inspektorat Jenderal dengan indikator persentase pegawai yang mendapatkan pelatihan dengan target 90%.
Jika dibandingkan capaian realisasi dan target maka pencapaian indikator adalah sebesar 94,55%.
Pencapaian sasaran tiap triwulan adalah sebagai berikut :
 - Triwulan I tercapai hingga sebesar 94,55%
 - Triwulan II sudah tercapai di Triwulan I
 - Triwulan III sudah tercapai di Triwulan I
 - Hingga Triwulan IV tercapai hingga sebesar 94,54%
- Pada triwulan pertama, diadakan diklat pengembangan SDM di bulan Maret 2017 di Surabaya, Jawa Timur yang diikuti oleh seluruh pegawai sebanyak 104 pegawai dari 110 pegawai, honorer dan OB dilingkungan Inspektorat Jenderal.
- Capaian realisasi pada tahun 2017 ini, mengalami peningkatan dari realisasi tahun sebelumnya. Berikut adalah perbandingan realisasi capaian pada tahun sebelumnya :

Tabel 132. Perbandingan capaian persentase pegawai yang mendapatkan pelatihan

PERBANDINGAN CAPAIAN	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017
Persentase pegawai yang mendapatkan pelatihan	99,88%	99,82%	100%	105,05%

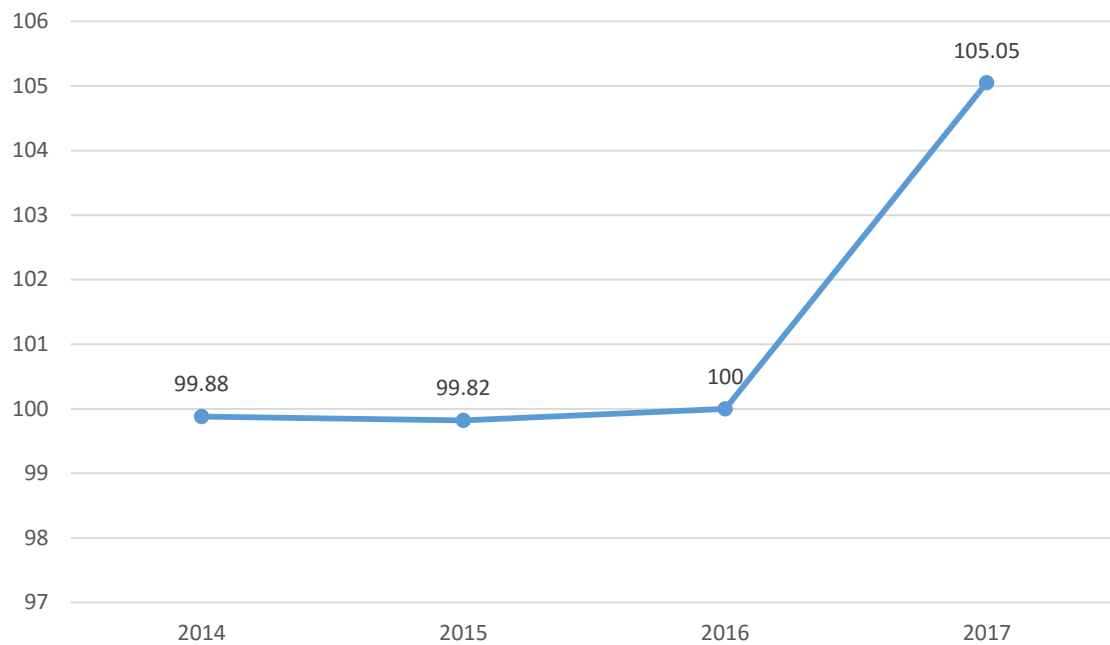


Diagram 6. Perbandingan persentase capaian pegawai yang mendapatkan pelatihan

c. Terlayannya urusan administrasi kepegawaian.

Capaian indikator ini diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target yang ditetapkan yaitu 12 Bulan.

Rincian indikator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 143. Capaian Terlayannya Urusan Administrasi Kepegawaian

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
3.	Meningkatnya profesionalisme dan integritas aparatur Inspektorat Jenderal	Terlayannya urusan administrasi kepegawaian	12 Bulan	12 Bulan	100

- Capaian Sasaran Program/Kegiatan meningkatnya profesionalisme dan integritas aparatur Inspektorat Jenderal dengan indikator terlayannya urusan administrasi kepegawaian dengan target 12 bulan. Jika dibandingkan capaian realisasi dan target maka pencapaian indikator adalah sebesar 12 bulan.

Pencapaian sasaran tiap triwulan adalah sebagai berikut :

- Triwulan I tercapai sebesar 3 bulan
- Triwulan II tercapai hingga sebesar 6 bulan
- Triwulan III tercapai hingga sebesar 9 bulan
- Triwulan IV tercapai hingga sebesar 12 bulan

4. Terbangunnya organisasi yang efektif dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan internal.

Pada sasaran ini terdapat 6 (enam) indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2017, yaitu :

Tabel 154. Sasaran Terbangunnya Organisasi Yang Efektif Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Pengawasan Internal

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
4	Terbangunnya organisasi yang efektif dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan internal	Tersedianya media informasi Inspektorat Jenderal	2 Layanan	2 Layanan	100
		Tersedianya dokumen kebijakan pengawasan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Persentase perbaikan SOP	30%	100%	233
		Tersedianya Laporan Keuangan dan BMN	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Tersedianya Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Terlayannya operasional ketatausahaan dan organisasi	12 Bulan	12 Bulan	100

a. Tersedianya media informasi Inspektorat Jenderal

Capaian indikator ini diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target yang ditetapkan yaitu 2 Layanan.

Rincian indikator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 165. Capaian Tersedianya Media Informasi Inspektorat Jenderal

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
4.	Terbangunnya organisasi yang efektif dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan internal	Tersedianya media informasi Inspektorat Jenderal	2 Layanan	2 Layanan	100%

- Capaian Sasaran Program/Kegiatan terbangunnya organisasi yang efektif dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan internal dengan indikator Tersedianya media informasi Inspektorat Jenderal dengan target 2 Layanan.

Jika dibandingkan capaian realisasi dan target maka pencapaian indikator adalah sebanyak 2 layanan.

Pencapaian sasaran tiap triwulan adalah sebagai berikut :

- Triwulan I belum dapat diukur
 - Triwulan II belum dapat diukur
 - Triwulan III tercapai hingga sebanyak 2 layanan
 - Triwulan IV tercapai hingga sebanyak 2 Layanan
- Capaian pada tahun 2017 sebanyak 2 Layanan adalah tersedianya aplikasi SPIP Online dengan alamat web itjen.kemenperin.go.id/spip dan penerbitan majalah solusi No.1 Vol.7/Juni 2017 dan No.2 Vol.7/Desember 2017.

b. Tersedianya dokumen kebijakan pengawasan.

Capaian indikator ini diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target yang ditetapkan yaitu 1 Dokumen

Rincian indikator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 176. Capaian Tersedianya Dokumen Kebijakan Pengawasan

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
4.	Terbangunnya organisasi yang efektif dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan internal	Tersedianya dokumen kebijakan pengawasan	1 dokumen	1 dokumen	100%

- Capaian Sasaran Program/Kegiatan terbangunnya organisasi yang efektif dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan internal dengan indikator tersedianya dokumen kebijakan pengawasan dengan target 1 dokumen.

Jika dibandingkan capaian realisasi dan target maka pencapaian indikator adalah sebesar 100%.

Pencapaian sasaran tiap triwulan adalah sebagai berikut :

- Triwulan I belum dapat diukur
 - Triwulan II belum dapat diukur
 - Triwulan III belum dapat diukur
 - Triwulan IV dapat tercapai 1 dokumen.
- Capaian pada tahun 2017 sebanyak 1 dokumen kebijakan pengawasan tentang “Kebijakan Teknis Pengawasan Internal Kementerian Perindustrian Tahun 2018” dengan SK No.04/M-IND/KEP/01/2018.

c. Persentase perbaikan SOP

Capaian indikator ini diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target yang ditetapkan yaitu 30%.

Rincian indikator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 187. Capaian Persentase Perbaikan SOP Yang Ter-update

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
4.	Terbangunnya organisasi yang efektif dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan internal	Persentase Perbaikan SOP.	30 %	100%	233

- Capaian Sasaran Program/Kegiatan terbangunnya organisasi yang efektif dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan internal dengan indikator persentase perbaikan SOP yang terupdate dengan target 30%.

Jika dibandingkan capaian realisasi dan target maka pencapaian indikator adalah sebesar 233%.

Pencapaian sasaran tiap triwulan adalah sebagai berikut :

- Triwulan I belum dapat diukur
 - Triwulan II belum dapat diukur
 - Triwulan III belum dapat diukur
 - Hingga Triwulan IV tercapai sebesar 233%
- Telah dilakukan perbaikan SOP sebanyak 28 SOP dari 28 SOP yang dimiliki Sekretariat Inspektorat Jenderal.

- Telah dilakukan migrasi dari ISO 9001:2008 ke ISO 9001:2015 pada tanggal 27 November 2017 oleh perusahaan Intersys Training and Consulting.
- SOP tersebut antara lain
 - Prosedur Mutu Pengendalian Dokumen
 - Prosedur Mutu Pengendalian Catatan
 - Prosedur Mutu Audit Internal
 - Prosedur Mutu Pengendalian Produk yang tidak sesuai
 - Prosedur Mutu Tindakan Perbaikan
 - Prosedur Mutu Tindakan Pencegahan
 - Prosedur Mutu Tinjauan Manajemen
 - Prosedur Mutu Penanganan Keluhan Kepuasan Pelanggan
 - Prosedur Mutu Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT)
 - Prosedur Mutu Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
 - Prosedur Mutu Laporan Evaluasi Hasil Pengawasan
 - Prosedur Mutu Pelaksanaan Pelatihan
 - Prosedur Mutu Surat Perintah Perjalanan Dinas
 - Prosedur Mutu Pengelolaan Asset/Barang Milik Negara
 - Prosedur Mutu Penanganan Surat Masuk
 - Prosedur Mutu Penanganan Surat Keluar
 - Prosedur Mutu Pengelolaan Barang Persediaan
 - Prosedur Mutu Pengadaan Barang dan Jasa
 - Prosedur Mutu Peminjaman Barang/ Inventaris
 - Prosedur Mutu Pembayaran Kepada Pihak ketiga
 - Prosedur Mutu Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
 - Prosedur Mutu Pelaksanaan Kegiatan Program
 - Prosedur Mutu Monitoring Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Program ITJEN
 - Prosedur Mutu Pencairan Anggaran
 - Prosedur Mutu Permohonan Perawatan BMN dan Ruang
 - Prosedur Mutu Pelaksanaan Audit
 - Prosedur Mutu Pembuatan Laporan Hasil Audit
 - Prosedur Mutu Penanganan Pengaduan Masyarakat

- Capaian realisasi pada tahun 2017 ini, mengalami peningkatan dari realisasi tahun sebelumnya. Berikut adalah perbandingan realisasi capaian pada tahun sebelumnya :

Tabel 198. Perbandingan Capaian Persentase Perbaikan SOP Yang Terupdate

PERBANDINGAN CAPAIAN	TAHUN 2016	TAHUN 2017
Persentase Perbaikan SOP.	100 %	233%

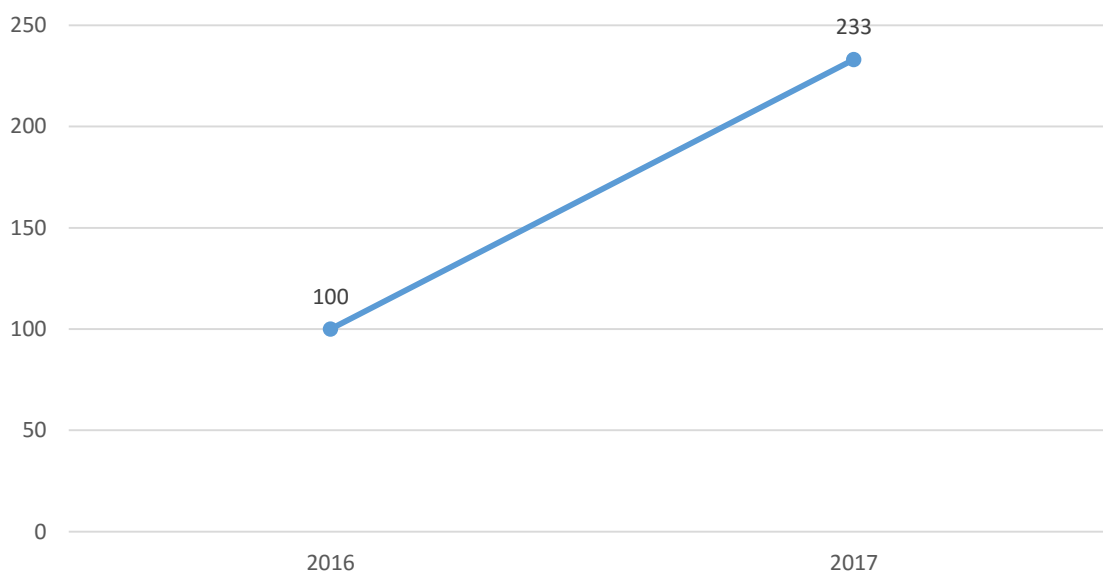


Diagram 7. Perbandingan persentase capaian perbaikan SOP yang terupdate

d. Tersedianya laporan keuangan dan BMN.

Capaian indikator ini diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target yang ditetapkan sebanyak 1 Dokumen.

Rincian indikator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 209. Capaian Tersedianya Laporan Keuangan Dan BMN

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
4.	Terbangunnya organisasi yang efektif dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan internal	Tersedianya laporan keuangan dan BMN	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

- Capaian Sasaran Program/Kegiatan terbangunnya organisasi yang efektif dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan internal dengan indikator tersedianya laporan keuangan dan BMN dengan target 1 dokumen.

Jika dibandingkan capaian realisasi dan target maka pencapaian indikator adalah sebesar 100%.

Pencapaian sasaran tiap triwulan adalah sebagai berikut :

- Triwulan I belum dapat diukur
 - Triwulan II belum dapat diukur
 - Triwulan III tercapai hingga sebanyak 1 dokumen
 - Hingga Triwulan IV tercapai sebanyak 1 dokumen
- Tersedianya 1 dokumen laporan keuangan dan BMN semester I TA 2017.
 - Capaian realisasi pada tahun 2017 tidak mengalami penurunan di banding tahun sebelumnya, dikarenakan setiap tahunnya wajib tersedianya laporan keuangan dan BMN, berikut adalah perbandingan realisasi capaian sasaran pada tahun sebelumnya :

Tabel 30. Perbandingan Capaian Tersedianya Laporan Keuangan Dan BMN.

PERBANDINGAN CAPAIAN	TAHUN 2016	TAHUN 2017
Tersedianya laporan keuangan dan BMN	100%	100%

e. Tersedianya laporan pengawasan dan pengendalian BMN.

Capaian indikator ini diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target yang ditetapkan sebanyak 1 Dokumen.

Rincian indikator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 31. Capaian Tersedianya Laporan Pengawasan Dan Pengendalian BMN

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
4.	Terbangunnya organisasi yang efektif dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan internal	Tersedianya laporan pengawasan dan pengendalian BMN.	1 Dokumen	1 Dokumen	100

- Capaian Sasaran Program/Kegiatan terbangunnya organisasi yang efektif dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan internal dengan indikator tersedianya laporan pengawasan dan pengendalian BMN dengan target 1 dokumen.

Jika dibandingkan capaian realisasi dan target maka pencapaian indikator adalah sebesar 100%.

Pencapaian sasaran tiap triwulan adalah sebagai berikut :

- Triwulan I belum dapat diukur
 - Triwulan II tercapai hingga sebanyak 1 dokumen
 - Triwulan III telah tercapai di TW II
 - Hingga Triwulan IV tercapai hingga sebesar 1 dokumen
- Tersedianya laporan pengawasan dan pengendalian BMN tahun 2016.
 - Capaian realisasi pada tahun 2017 tidak mengalami penurunan di banding tahun sebelumnya, dikarenakan setiap tahunnya wajib tersedianya laporan pengawasan dan pengendalian BMN, berikut adalah perbandingan realisasi capaian sasaran pada tahun sebelumnya:

Tabel 212. Perbandingan Capaian Tersedianya Laporan Pengawasan Dan Pengendalian BMN

PERBANDINGAN CAPAIAN	TAHUN 2016	TAHUN 2017
Tersedianya laporan pengawasan dan pengendalian BMN.	100%	100%

f. Terlayannya operasional ketatausahaan dan organisasi.

Capaian indikator ini diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target yang ditetapkan yaitu 12 Bulan.

Rincian indikator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 223. Capaian Terlayannya Operasional Ketatausahaan Dan Organisasi

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
----	---------------------------------	----------------------	--------	-----------	---

4.	Terbangunnya organisasi yang efektif dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan internal	Terlayannya operasional ketatausahaan dan organisasi	12 Bulan	12 Bulan	100%
----	---	--	----------	----------	------

- Capaian Sasaran Program/Kegiatan terbangunnya organisasi yang efektif dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan internal dengan indikator terlayannya operasional ketatausahaan dan organisasi dengan target 12 bulan.

Jika dibandingkan capaian realisasi dan target maka pencapaian indikator adalah sebesar 100%.

Pencapaian sasaran tiap triwulan adalah sebagai berikut :

- Triwulan I tercapai sebesar 3 bulan
- Triwulan II tercapai sebesar hingga 6 bulan
- Triwulan III tercapai sebesar hingga 9 bulan
- Triwulan IV tercapai sebesar hingga 12 bulan

Tabel 34. Capaian Triwulan Sasaran Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)				
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan ketaatan terhadap perundang-undangan	Presentase satuan kerja yang telah menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan	87%	6,19%	26,52%	55,81%	91,87%
		Tersedianya dokumen analisa dan pemantauan hasil pengawasan	4 Paket Dokumen	Laporan APIP tahun 2016	Tersedia data untuk draft laporan APIP semester I	Laporan APIP Semester I tahun 2017	-Laporan Zona Integritas -Laporan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberan

					tahun 2017		tasan Korupsi
		Jumlah satuan kerja yang diusulkan menjadi WBK/WBBM	12 Satuan Kerja	Belum dapat diukur	Terdapat 5 satuan kerja yang diusulkan menjadi satker WBK/WBBM	Terdapat 5 satuan kerja yang diusulkan menjadi satker WBK/WBBM	-
2.	Meningkatnya efektifitas pelaksanaan kebijakan program pengawasan internal	Tersedianya dokumen perencanaan dan anggaran	1 Dokumen	-1 Dokumen Satuan 3B -1 Dokumen Perjanjian Kinerja	Tersedia Draft Renja Tahun 2018 dan Pagu Indikatif Tahun 2018	-Pagu anggaran tahun 2018 telah diterbitkan -Dokumen Rencana Kinerja tahun 2018 telah diterbitkan	-Dokumen DIPA TA 2018. -Draft PKPT berbasis resiko tahun 2018 telah disusun
		Tersedianya dokumen evaluasi pelaksanaan program kerja Inspektorat Jenderal	3 Paket Dokumen	-LAKIP Es.I dan Es.2 - Laporan PP39 TW IV Tahun 2016 Es.I dan Es.II	1 Paket Dokumen (Laporan PP39 TW I tahun 2017 Es.I dan Es.II)	1 Paket Dokumen (Laporan PP39 TW II tahun 2017 Es.I dan Es.II)	1 Paket Dokumen (Laporan PP39 TW III tahun 2017 Es.I dan Es.II)
3.	Meningkatnya profesionalisme dan integritas aparatur Inspektorat Jenderal	Persentase auditor yang mengikuti penjenjangan auditor	10%	Belum dapat diukur	Belum dapat diukur	Telah dilakukan diklat penjenjangan auditor. (4 orang diklat auditor muda dan 1 orang diklat auditor madya)	-
		Persentase pegawai yang mendapatkan pelatihan	90%	Telah dilakukan diklat pengembangan SDM di bulan Maret 2017 di	-	-	-

				Surabaya Jawa Timur dan diikuti oleh seluruh pegawai			
		Terlayannya urusan administrasi kepegawaian	12 Bulan	Terlayannya urusan administrasi kepegawaian selama 3 bulan	Terlayannya urusan administrasi kepegawaian selama 3 bulan	Terlayannya urusan administrasi kepegawaian selama 3 bulan	Terlayannya urusan administrasi kepegawaian selama 3 bulan
4.	Terbangunnya organisasi yang efektif dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan internal	Tersedianya media informasi Inspektorat Jenderal	2 Layanan	Belum dapat diukur	- Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan (online SPIP) - Tersedianya majalah solusi Semester I	Aplikasi Online SPIP telah dapat digunakan.	Telah terbit majalah solusi Semester II tahun 2017
		Tersedianya dokumen kebijakan pengawasan	1 Dokumen	Belum dapat diukur	Belum dapat diukur	Koordinasi dalam penyusunan pedoman kebijakan pengawasan, FGD Penyusunan Konsep pedoman dan kebijakan pengawasan dan kebijakan pengawasan (4 pedoman pengawasan) dan FGD	1 dokumen kebijakan pengawasan tentang "Kebijakan Teknis Pengawasan Internal Kementerian Perindustrian tahun 2018"

						Penyusunan Konsep Pedoman dan Kebijakan Pengawasan telah dilaksanakan pada bulan September 2017.	
		Persentase perbaikan SOP	30%	Belum dapat diukur	Belum dapat diukur	Penyusunan/penyempurnaan SOP telah dilaksanakan pada bulan September 2017	-Telah dilakukakan migrasi dari ISO 9001:2008 ke ISO 9001:2015 dengan perbaikan 28 SOP yang dimiliki Sekretariat Inspektora t Jenderal
		Tersedianya Laporan Keuangan dan BMN	1 Dokumen	Tersedianya dokumen laporan keuangan dan BMN TA 2016	Tersedianya data bahan laporan keuangan dan BMN semester I TA 2017	Tersedianya laporan keuangan dan BMN semester I TA 2017	Pengumpulan data bahan laporan keuangan dan BMN TA 2017 masih dalam proses penyelesaian
		Tersedianya Laporan pengawasan dan pengendalian BMN	1 Dokumen	Tersedianya 1 dokumen laporan pengawasan dan pengendalian BMN TA 2016	Tersedianya data pengawasan dan pengendalian BMN TA 2017	Tersedianya data pengawasan dan pengendalian BMN TA 2017	Telah disusun laporan pengawasan dan pengendalian BMN TA 2017
		Terlayannya operasional ketatausahaan dan organisasi	12 Bulan	Telah terlayannya urusan organisasi dan tatalaksana	Telah terlayannya urusan organisasi	Telah terlayannya urusan organisasi dan tatalaksana selama 3 bulan	Telah terlayannya urusan organisasi dan tatalaksana selama 3 bulan

				selama 3 bulan	dan tata ksana selam a 3 bulan		
--	--	--	--	-------------------	---	--	--

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2017 mencapai Rp. 27.517.095.000,-, namun anggaran tersebut mengalami perubahan/revisi menjadi Rp. 26.728.832.000,- yang dibiayai melalui *Kegiatan Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal*. Pengelolaan anggaran tersebut dilakukan pada Sekretariat Inspektorat Jenderal dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 24.759.038.820,- atau 92,63% dari total pagu Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Secara rinci realisasi keuangan berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dapat dilaporkan sebagai berikut :

Tabel 235. Realisasi Keuangan Berdasarkan Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2017

Uraian	Pagu	Realisasi	%
Layanan Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Hasil Pengawasan	1.545.336.000	1.539.937.088	99,65
Layanan Laporan Norma/Standar/Pedoman/Ketentuan Pengawasan	610.616.000	605.502.400	99,16
Layanan Dukungan Pengawasan dan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Lainnya	1.000.820.000	995.817.215	99,50
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	4.016.660.000	3.982.312.299	99,14
Layanan Internal (Overhead)	1.829.400.000	1.816.510.690	99,30
Layanan Perkantoran	17.454.120.000	15.818.959.128	90,63

Output Cadangan	271.880.000	0	00.00
Total	26.728.832.000	24.759.038.820	92,63

Dilihat dari penyerapan anggaran, pada umumnya anggaran dapat terserap lebih dari 95%,al itu disebabkan adanya self blocking dan beberapa kali penghematan.

Jika dilakukan analisa efisiensi sumber daya dengan melihat alokasi anggaran dan indikator guna pencapaian kinerja, dimana anggaran yang disediakan dalam pelaksanaan kegiatan di Sekretariat Inspektorat Jenderal umumnya secara simultan mendukung capaian sasaran yang ditetapkan pada tapkin. Namun terdapat anggaran yang bisa langsung dapat dikaitkan dengan indikator sasaran kinerja dan terdapat anggaran yang tidak bisa langsung dikaitkan, sehingga tidak seluruh anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal terbagi habis untuk pencapaian sasaran kinerja. Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran kinerja dengan indikator yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 246. Alokasi dan Realisasi Anggaran per Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan ketaatan terhadap perundang-undangan	Presentase satuan kerja yang telah menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan	87%	Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	1.082.790.000	1.070.881.088	98,90
				Forum Koordinasi Data Hasil Pemeriksaan Internal	300.716.000	298.319.000	99,20
		Tersedianya dokumen analisa dan pemantauan hasil pengawasan	4 Paket Dokumen	Analisis dan Evaluasi Pelaporan Hasil Pengawasan	161.830.000	155.830.000	96,29
		Jumlah satuan kerja yang diusulkan menjadi WBK/WBBM	12 Satuan Kerja	Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Jenderal	432.190.000	431.694.130	99,89
				Pelayanan Konsultasi dan Penguatan Pengawasan Inspektorat Jenderal	568.630.000	544.123.085	95,69
2.	Meningkatnya efektifitas pelaksanaan kebijakan program pengawasan internal	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran	1 Dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	665.612.000	648.695.700	97,46
				Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja	305.820.000	303.061.407	99,10
		Tersedianya dokumen evaluasi pelaksanaan program kerja Inspektorat Jenderal	3 Paket Dokumen	Evaluasi Pelaksanaan Program Pengawasan Inspektorat Jenderal	814.240.000	804.447.244	98,80

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
3.	Meningkatnya profesionalisme dan integritas aparatur Inspektorat Jenderal	Persentase auditor yang mengikuti penjenjangan auditor	10%	Pengembangan SDM Inspektorat Jenderal	1.001.850.000	966.995.896	96,52
		Persentase pegawai yang mendapatkan pelatihan	90%	Pengembangan SDM Inspektorat Jenderal			
		Terlayannya urusan administrasi kepegawaian	12 Bulan	Penatausahaan Urusan Kepegawaian	293.580.000	288.236.178	98,18
4.	Terbangunnya organisasi yang efektif dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan internal	Tersedianya media informasi Inspektorat Jenderal	2 Layanan	Penataan Sistem Informasi	62.640.000	56.840.000	90,74
				Penyusunan Majalah Solusi	132.310.000	121.949.900	92,17
		Tersedianya dokumen kebijakan pengawasan	1 Dokumen	Penyusunan dan Evaluasi Pedoman/Kebijakan/Ketentuan Pengawasan/SOP	610.616.000	595.002.400	97,44
		Persentase perbaikan SOP	30%	Penyusunan dan Evaluasi Pedoman/Kebijakan/Ketentuan Pengawasan/SOP			
		Tersedianya Laporan Keuangan dan BMN	1 Dokumen	Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan dan BMN	43.840.000	40.000.000	91,24
				Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Inspektorat Jenderal	295.950.000	292.267.875	98,76
		Tersedianya Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN	1 Dokumen	Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Inspektorat Jenderal	24.200.000	20.812.000	86,00
		Terlayannya operasional ketatausahaan dan organisasi	12 Bulan	Peningkatan Budaya Kerja Melalui Implementasi 5K	123.800.000	115.029.000	92,92
				Penataan Ketata Usahaan dan Arsip Inspektorat Jenderal	252.818.000	249.020.299	98,50
				Pengadaan Kendaraan Bermotor	574.000.000	554.152.190	96,54
				Pengadaan Perangkat Pengolah Data Komunikasi	480.000.000	473.830.000	98,71
Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	775.400.000			773.528.500	99,76		
Gaji dan Tunjangan	13.374.296.000			11.411.449.134	85,32		
Operasional dan Pemeliharaan Kantor	4.079.824.000	3.942.125.999	96,62				

Dilihat dari alokasi anggaran, semua kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan telah terbiayai. Dari sisi penyerapan anggaran terlihat adanya efisiensi

penggunaan anggaran, dimana target tetap dapat dicapai namun tidak seluruh anggaran digunakan.

BAB IV

P E N U T U P

A. KEBERHASILAN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2016. secara umum dapat dikemukakan :

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2017 telah berjalan baik, tercermin dari tercapainya sasaran kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran.

2. Sekretariat Inspektorat Jenderal telah memfasilitasi APIP untuk dapat melakukan Reviu Laporan Keuangan / BMN satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian sehingga Kementerian Perindustrian berhasil mempertahankan Opini Laporan Keuangan dan BMN Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
3. Pelaksanaan pemeriksaan telah didukung oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal dengan pelaksanaan updating data, untuk mendukung penyiapan data sebelum pelaksanaan audit, dan setelah pelaksanaan audit telah dilakukan pemantauan dan pemutakhiran data tindak lanjut. Capaian penyelesaian tindak lanjut pada tahun 2017 adalah 91,87% temuan pemeriksaan telah ditindaklanjuti.
4. Berdasarkan pendampingan dan audit eksternal terhadap sistem manajemen mutu, Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian telah mendapatkan ISO 9001:2015.
5. Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian pada tahun 2017 telah menerbitkan Majalah Solusi per triwulan, sebagai wahana komunikasi dan informasi bagi auditor dan *auditee* di lingkungan Kementerian Perindustrian dan sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi auditor.

B. PERMASALAHAN/KENDALA

Permasalahan/kendala yang dihadapi atas pelaksanaan program Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2017 dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Anggaran tahun 2016 tidak seluruhnya terserap, disebabkan adanya *self blocking* dan penghematan beberapa kali.

C. UPAYA DAN STRATEGI PEMECAHAN

Untuk mengatasi permasalahan dan kendala tersebut, langkah-langkah dan strategi pemecahan yang dilakukan adalah :

1. Perencanaan program dan anggaran untuk kegiatan pada tahun 2016 disusun dengan berupaya melakukan efisiensi anggaran pelaksanaan rapat koordinasi.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian tahun 2017 ini disusun. yang menggambarkan tentang kinerja. permasalahan-permasalahan serta hasil evaluasinya. Diharapkan laporan ini bermanfaat sebagai bahan informasi bagi upaya-upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, serta bahan masukan untuk pembuatan Laporan Akuntabilitas Inspektorat Jenderal.